

**STRATEGI PENANAMAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI SOLUSI
TERKIKISNYA NASIONALISME MELALUI PENGEMBANGAN
MODEL PEMBELAJARAN BERORIENTASI
KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PERGURUAN TINGGI**

Winarno

Universitas Negeri Surakarta
Email:winarno.uns@yahoo.co.id

Sri Haryati

Universitas Negeri Surakarta

Moh. Muhtarom

Universitas Negeri Surakarta

ABSTRACT

This paper explained the potential threat among the university student, internal and external threat. Internal threat showed of skepticism on Pancasila ideology which triggered the disappointment on the state, the external threat was the other side efforts to socialized other ideology with various ways to decreased nationalism. The qualitative and quantitative data showed there area strong supports on Pancasila ideology among the majority of university student. The personality establishment course at the university's rule was supporting the ideology establishment effort; however there were some problems which related to its learning, as the monotone lecturer learning model and grading instrument which was not appropriate with the measured competence. The developed model strategy was a contra ideology with unique steps.

Keywords: Nationalism, Pancasila Ideology, Learning Model, Citizenship Education, and University.

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan seputar potensi ancaman ideologi di kalangan mahasiswa berupa ancaman internal dan eksternal, ancaman internal berupa keraguan terhadap ideologi Pancasila yang dipicu kekecewaan terhadap negara, sedangkan ancaman eksternal berupa upaya pihak lain dalam mensosialisasikan ideologi lain dengan beragam cara guna mengikis nasionalisme. Dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, ditemukan bahwa dukungan terhadap ideologi Pancasila masih kuat pada sebagian besar mahasiswa. Peraturan tentang mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi telah mendukung upaya penanaman ideologi, tetapi masih menyisakan permasalahan terkait pembelajarannya, di antaranya model pembelajaran dosen yang monoton dan instrumen penilaian yang tidak sesuai kompetensi yang diukur. Strategi model yang dikembangkan adalah kontra ideologi yang memiliki langkah-langkah yang khas.

Kata Kunci: Nasionalisme, Ideologi Pancasila, Model Pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Tinggi.

PENGANTAR

Membangun karakter bangsa lewat dunia pendidikan merupakan amanat konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, membangun karakter generasi penerus bangsa harus menjadi prioritas utama pendidikan, yang dilakukan sedini mungkin melalui seluruh jalur pendidikan termasuk perguruan tinggi. Pada sisi lain secara generik pendidikan yang mengindonesia adalah pendidikan yang menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya; yang mampu memanusiaikan, membudidayakan dan mengindonesiakan anak bangsa; yang menuntun kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila (Gunawan, 2009).

Kondisi karakter bangsa Indonesia saat ini, dengan munculnya berbagai permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti radikalisme menggambarkan indikasi mulai terkikisnya rasa nasionalisme dan erosi ideologi kebangsaan yang begitu kompleks. Hadirnya era globalisasi bagi bangsa Indonesia tampaknya membuat kemunduran bangsa ini dalam berbagai aspek kehidupannya. Berbeda dengan negara-negara lain, justru pada era globalisasi ini membuat bangsa semakin kuat dan kokoh dalam semangat nasionalismenya. Kemajuan ipteks di negaranegara maju semakin membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa konsumtif termasuk nilai-nilai budaya.

Pada sisi lain, radikalisme di kalangan generasi muda menjadi masalah serius karena

menjadikan mereka tidak setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang selama lebih 30 tahun pada era Orde Baru lebih banyak dititikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara terhadap tafsir resmi rejim politik. Kepatuhan warga negara terhadap tafsir rejim (pemerintah) dianggap sebagai kebajikan atau keutamaan warga negara (*civic virtues*) yang dilekatkan pada misi pendidikan kewarganegaraan ketika itu. Kepatuhan tersebut di satu sisi melahirkan hipokrasi (kemunafikan) antara wacana dengan tindakan kewargaan (*civic action*) yang diharapkan. Sementara itu, ukuran keutamaan tindakan kewargaan sebagai akibat hipokrasi tadi ialah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publik, sehingga tindakan kewargaan yang diekspresikan seorang individu cenderung bersifat semu (Samsuri, 2010). Kondisi tersebut justru dimungkinkan menjadikan warga tidak menghayati ideologi Pancasila, karena tanpa pendekatan logis dalam penanamannya karena lemahnya model pembelajaran yang digunakan, Penanaman ideologi Pancasila melalui model pembelajaran yang khas, sesuai dengan nalaran yang tepat pada gilirannya akan memunculkan variasi model-model pembelajaran yang semakin memperkaya khazanah model pembelajaran yang telah ada sehingga pembelajaran menjadi menarik dan dapat mencapai kompetensi tinggi. karena menempatkan pendidikan melalui model pembelajaran yang sesuai kebutuhan diharapkan mampu menguatkan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai implementasi kebijakan mata kuliah pengembangan

kepribadian di perguruan tinggi (Triwahyuningih, 2011).

PEMBAHASAN

Peraturan tentang MPK

Peraturan atau kebijakan tentang mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan perguruan tinggi dapat dijelaskan bahwa. penguatan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan berlandaskan pada:

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 36 (2) beserta ketentuan perundang-undangan turunannya.

Ketiga, UU Perguruan Tinggi No 12 Tahun 2012.

Keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Keenam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. *Ketujuh*, Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43 / Dikti/ Kep/ 2006.

Peraturan tersebut sudah memayungi eksistensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, tetapi saat ini sedang dirumuskan draf materi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berorientasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila. UUD 1945, NKRI. dan Bhineka Tunggal Ika, dan dalam waktu dekat akan diterbitkan peraturannya (Dikti, 2012).

Potensi Ancaman Dan Dukungan Ideologi Pancasila Dan Nasionalisme Mahasiswa.

Potensi ancaman dan dukungan ideologi Pancasila dan nasionalisme mahasiswa, terbagi menjadi dua. yaitu ancaman internal dan eksternal serta dukungan internal dan eksternal. Ancaman internal berasal dari diri mahasiswa sendiri, berupa keraguan terhadap ideologi negara Pancasila dan NKRI. Hal ini terjadi karena ada benturan nilai antara yang mereka yakini dengan realita di lapangan, yang intinya berupa kekecewaan terhadap negara karena dinilai tidak dapat memenuhi harapan mereka. Harapan mereka adalah negara yang mampu memberikan kesejahteraan kepada setiap warganya dan menegakkan nilai-nilai agama yang mereka yakini.

Selain keraguan terhadap negara mereka juga memiliki keyakinan yang keliru terhadap nilai-nilai yang diyakini. Ancaman eksternal berupa upaya yang sangat gencar dari pihak lain dengan memanfaatkan keraguan dan idealisme mahasiswa dengan cara didoktrin dengan pemikiran-pemikiran yang radikal melalui berbagai modus. Modus tersebut antara lain melalui kelompok bermain dan komunitas mahasiswa yang terafiliasi kegiatan keagamaan dan kemahasiswaan yang menggunakan agama sebagai dalih. Berdasarkan selebaran dan data yang dihimpun upaya pihak tidak bertanggungjawab itu bertujuan mengikis nasionalisme dan berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam sesuai tafsir mereka. Pada sisi lain bahwa Islam radikal dipandang dari unit analisis historis dan ekonomi politik. berakar dari adanya kesenjangan-kesenjangan di masyarakat Indonesia (Rizky, 2010). Dukungan terhadap ideologi Pancasila dan nasionalisme masih kuat pada sebagian besar mahasiswa.

dukungan internal berupa keyakinan yang mapan pada nilai-nilai agamanya dan dukungan eksternal berupa peran pemuka agama serta orang tua yang senantiasa mendampingi mereka menangkal tafsir sepihak dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan berusaha mempengaruhi mereka. Dukungan tersebut juga didapat melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, namun pada sisi lain beberapa mahasiswa mereka bahwa model pembelajaran yang digunakan dosennya bersifat doktrinatif dan kadang monoton.

Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Permasalahan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, jumlah kelas yang terus meningkat (program reguler, non reguler/swadana, diploma). Hal ini menyebabkan dosen mengajar tidak hanya satu kelas, tetapi beberapa kelas, dan pada gilirannya menjadikan pembelajaran tidak efektif.

Kedua, keterbatasan dosen yang memenuhi kualifikasi. Sesuai persyaratan yang ada yang berwenang mengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah alumni sados Lemhannas, Hukum, dan S2 Ketahanan Nasional. Karena jumlah kelas yang relatif banyak dosen yang memenuhi kualifikasi tersebut tidak cukup sehingga di beberapa perguruan tinggi yang mengampu dosen lain yang dianggap relevan. Kondisi ini membuat substansi mata kuliah kurang dikuasai oleh pengampunya (Sugito, 2012).

Ketiga, perekrutan dosen kurang terprogram. Usia pensiun dosen tidak diimbangi dengan pengangkatan dosen baru.

terlebih pada tahun 2012 ada moratorium pengangkatan PNS sehingga perguruan tinggi berhati-hati dalam hal ini. Selain itu mata kuliah pengembangan kepribadian sejatinya di banyak perguruan tinggi tidak memiliki dosen tersendiri sehingga menyulitkan dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Keempat, sarana prasarana dan media pembelajaran. Sarana dan prasarana berupa ketersediaan buku penunjang dan media pembelajaran yang relevan masih terbatas. Hal ini mengakibatkan mahasiswa kurang terpacu dalam belajar sehingga kurang mencapai kompetensi yang diharapkan.

Kelima, model, metode mengajar dosen yang monoton. Model pembelajaran yang dilakukan dosen relatif monoton. didominasi ceramah dan diskusi, tetapi masih menempatkan metode pembelajaran Pancasila secara doktrinatif. Hal ini yang membuat mahasiswa merasa tidak memiliki argumentasi yang kuat untuk meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sisi lain pembelajaran yang mestinya diselenggarakan secara afektif masih dilakukan secara kognitif. *Keenam*, Budaya akademis/sikap mahasiswa terhadap mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ada yang cenderung meremehkan. Permasalahan klasik yang dihadapi pada pembelajaran mata kuliah umum adalah sikap apatis mahasiswa. mereka merasa mata kuliah umum tidak penting dan kurang menunjang keahliannya. sehingga membuat mereka skeptis (Sugito, 2012).

Ketujuh, jenis penilaian ujian tengah semester, ujian akhir semester. ujian kompetensi dasar yang belum sepenuhnya mengukur apa yang akan diukur. Penilaian harus disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai. jika kompetensi berupa civic knowledge berarti

menggunakan tes, tetapi jika civic disposition menggunakan skala sikap dan bila *civic skill* menggunakan lembar pengamatan. Kenyataan di lapangan menunjukkan dosen belum sepenuhnya menerapkan penilaian secara tepat.

Strategi pengembangan model pembelajaran berorientasi kompetensi pendidikan kewarganegaraan Rumusan tentang strategi pengembangan model pembelajaran berorientasi kompetensi pendidikan kewarganegaraan dapat dijelaskan bahwa berdasarkan temuan di lapangan perlu adanya model yang menumbuhkan sikap meyakini ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memungkinkan mahasiswa bisa aktif dan rasional dalam mengkritisi fenomena yang ada di masyarakat, dan secara utuh desain pembelajaran yang ada harus konsisten sampai ke penilaiannya.

Model yang dimaksud adalah kontra ideologi, untuk mengembangkan model pembelajaran kontra ideologi berpijak pada teori belajar konstruktivisme berorientasi temuan di lapangan. Adapun langkah-langkah khas model tersebut yang mengacu model pengembangan Dick and Carry adalah;

Pertama, penjelasan secara nalar mengenai ideologi Pancasila (Besar, 2007).

Kedua, mengkritisi ideologi yang berkembang dalam masyarakat secara nalar (ideologi kiri radikal. ideologi kanan liberal. Islam fundamentalis. Islam non mainstream (Asad, 2012). *Ketiga*, menentukan sikap terhadap ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia.

Keempat, mengevaluasi keyakinan mahasiswa terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelima, melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran tentang ideologi Pancasila dan nasionalisme.

Pengembangan model tersebut bermula dari standar kompetensi lulusan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kemudian turun menjadi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi ajar, dan langkah-langkah model yang dimaksud muncul dalam kegiatan pembelajaran yang direncanakan terlebih dahulu pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Jika dilihat standar kompetensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Standar kompetensi tersebut jika dikritisi belum menggunakan kata kerja operasional yang terukur, yang tepat adalah menunjukkan sikap dan perilaku, baru kemudian diturunkan menjadi kompetensi dasar, indikator, dan materi.

Terkait pengembangan model kontra ideologi dapat dipilih kajian tentang identitas nasional, yang jika dikembangkan standar kompetensinya berbunyi: (1) mengembangkan sikap mendukung identitas nasional, kemudian kompetensi dasarnya adalah menjelaskan hakikat identitas nasional Indonesia; (2) mengkonstruksi upaya pemberdayaan identitas nasional; (3) mengkonstruksi revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional; (4) menganalisis perwujudan identitas nasional; (5) menampilkan sikap mendukung revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional. Berbicara model sebagai modus tak terlepas dengan isi.

untuk itu isi atau materi ajarnya dapat disusun sebagai berikut: (1) Hakikat identitas nasional (2) Upaya pemberdayaan identitas nasional (3) revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional (4) ideologi kiri: radikal, isu anti neoliberal (5) ideologi pasca reformasi (6) ideologi kanan: Islam fundamentalis, salafi (7) agama dan negara; (8) pertarungan ideologi; (9) pengamalan ideologi Pancasila; (10) pengembangan deradikalisasi (11) perwujudan identitas nasional.

SIMPULAN

Potensi ancaman ideologi di kalangan mahasiswa berupa ancaman internal dan eksternal. ancaman internal berupa keraguan terhadap ideologi Pancasila yang dipicu kekecewaan terhadap negara. sedangkan ancaman eksternal berupa upaya pihak lain dalam mensosialisasikan ideologi lain dengan beragam cara guna mengikis nasionalisme.

Dukungan terhadap ideologi Pancasila masih kuat pada sebagian besar mahasiswa karena mapannya keyakinan yang dimiliki. Peraturan tentang mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi telah mendukung upaya penanaman ideologi. tetapi masih menyisakan permasalahan terkait pembelajarannya. di antaranya model pembelajaran dosen yang monoton dan instrumen penilaian yang tidak sesuai kompetensi yang diukur.

Strategi model yang dikembangkan adalah kontra ideologi, yang memiliki langkah-langkah khas: (1) penjelasan

secara nalar mengenai ideologi Pancasila; mengkritisi ideologi yang berkembang (2) dalam masyarakat secara nalar (ideologi kiri radikal, ideologi kanan liberal, Islam fundamentalis, Islam non mainstream; (3) menentukan sikap terhadap ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia; (4) mengevaluasi keyakinan mahasiswa terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (5) melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran tentang ideologi Pancasila dan nasionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Asad, Said. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- AT Sugito. 2012. *Materi Pelatihan Pendidikan Karakter Bagi Dosen PKN*. Jakarta: Dikti.
- Besar, Abdul Kadir, 2007. *Politik Ideologi*. Yogyakarta: UGM.
- Gunawan. 2009. *Menuju Jati Diri Pendidikan yang Mengindonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rizky, Ahmad. 2010 *Membedah Radikalisme di Indonesia* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 14 No 2.
- Triwahyuningsih. 2011. "Harapan Peluang dan Tantangan Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila". Proceeding Kongres Pancasila III.

Internet:

www.dikti.go.id diakses 10 September 2012.